

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sifat konfliktual setelah berakhirnya perang dingin dan perubahan transformasi sistem internasional membuat dunia hanya terlihat aman secara makro. Situasi ini membuat banyak negara perlu melakukan perlindungan terhadap kepentingan nasionalnya masing-masing. Dalam hal ini, kekuatan militer memainkan peranan penting sebagai instrument politik kepentingan nasional.¹ Kekuatan militer tidak hanya berbicara mengenai postur militer saja, namun faktor gelar pasukan, persiapan, dan operasionalisasi yang dipengaruhi oleh kondisi strategi.² R.S Cline menjelaskan bahwa *power* sebuah negara tidak hanya dibentuk oleh kekuatan ekonomi, strategi, sasaran, dan *critical mass* saja, faktor militer turut memainkan peranan.³

Sebagai instrument politik dalam mencapai kepentingan nasional, kekuatan militer tidak harus bersifat superior, namun secara strategis, dapat beradaptasi dengan lingkungan internasional dan militer yang terus berubah.⁴ Kekuatan militer sebagai bagian dari postur pertahanan adalah sebuah kapasitas sebuah negara untuk, secara politik, mempengaruhi negara lain atau sistem dalam hubungan internasional.⁵ Implikasi militer akan memberikan pengaruh *direct military violence* dan *indirect military violence* yang menentukan fungsi militer dalam membentuk keseimbangan kekuatan, mengatur kestabilan situasi pada level global dan regional, alat *political pressure*, dan melawan serta mengalahkan agresor.⁶ Karena itu, kekuatan militer dapat dilihat sebagai jaminan terhadap kemerdekaan sebuah bangsa, memberikan pilihan dalam membuat kebijakan politik, serta berfungsi sebagai pilihan tepat untuk menangkal ancaman militer,

¹ Vladimir Plotnikov, Headquarter of Russian Airborne Troops dalam *Use of Force in Resolving Military Conflict: Ways to Increase Efficiency*, h. 115

² Paul K. Davis, Et al, *Adaptiveness in National Defense: The Basis of a New Framework*, Issue Paper, Rand: National Defense Research Institute (August 1996), h. 1

³ Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007. h. 40

⁴ Paul K. Davis, *op .cit*

⁵ Vladimir Plotnikov, *op. cit.* h. 116

⁶ *Ibid*

jika situasi mengarah pada terjadinya konflik.⁷ Selain itu, kekuatan militer juga berfungsi untuk meningkatkan kapabilitas negara dalam mencapai tujuan-tujuan politik dan kepentingan geopolitiknya.⁸

Dalam bahasa serupa, kekuatan militer, sebagai upaya internal, dibentuk sebagai bagian dari postur pertahanan nasional dan pembangunan kekuatan untuk menghadapi ancaman dan persaingan. Seperti halnya negara-negara lain, pembangunan postur pertahanan Indonesia merupakan sebuah instrumen politik untuk mencapai kepentingan nasional. Pembangunan atau pengembangan postur pertahanan (kekuatan, kemampuan, dan gelar pasukan militer) yang dibentuk dan diarahkan oleh doktrin pertahanan. Karena itu, doktrin pertahanan dikembangkan berdasarkan pola pikir yang merefleksikan sekaligus mengimplementasikan rencana strategis yang dituangkan dan ditujukan dalam melakukan pengembangan postur pertahanan sebagai alat pertahanan negara yang diarahkan oleh doktrin pertahanan.⁹ Arah kebijakan doktrin pertahanan dalam membentuk organisasi, struktur pertahanan, dan pengembangan postur pertahanan harus berdasarkan pada pemahaman mengenai situasi dan kondisi lingkungan strategis, terutama lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara. Pengembangan postur pertahanan merupakan sikap responsif bagi negara untuk memandang hambatan sebagai tantangan yang mesti disikapi. Kemampuan sebuah negara dalam mengembangkan postur pertahanan yang dipengaruhi oleh cara pandang doktrin yang akan menentukan kemampuan negara dalam melakukan *self-defense* dan ekspansi kepentingan nasionalnya.¹⁰ Kemampuan negara dalam mengembangkan kekuatan militernya yang ditujukan untuk merespon perubahan lingkungan strategis, pada akhirnya, akan menentukan posisi tawar sebuah negara dalam sistem internasional. Kemampuan sebuah negara dalam mengembangkan postur pertahanannya terlihat pada bagaimana negara tersebut mampu mengadaptasi penggunaan teknologi dalam memperkuat kemampuan militernya. Teknologi

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ Ka Po Ng, *Interpreting China's Military Power: Doctrine Makes Readiness*, USA: Taylor and Francis Group, 2005

¹⁰ Stephen Van Evera, *Offense, Defense, and the Causes of War*, International Security, Vol. 22, No. 4 (Spring, 1998), h. 5

merupakan salah satu indikator yang mendukung bagaimana negara dapat memiliki dan mengaplikasikan kekuatan militernya demi tujuan keamanan nasional, serta pengimplementasian gelar pasukan sebagai strategi yang digunakan untuk merespon ancaman dan persaingan eksternal.

Kondisi nyata pengembangan postur pertahanan yang dipengaruhi oleh cara pandang doktrin pertahanan tidak hanya merefleksi bentuk kepemimpinan politisi sipil atas militer, juga mencakup tata gelar kekuatan pertahanan dan pemahaman lingkungan strategis dan kepentingan nasional.¹¹ Pada kenyataannya, doktrin pertahanan TNI AD masih menganut strategi defensif aktif,¹² yang menekankan pada usaha mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, serta kepentingan nasional yang hanya berdasarkan pada tindakan preventif aktif, preemtif aktif, dan represif. Karakter doktrin pertahanan Indonesia yang masih bersifat *inward-looking* hanya menekankan pada ancaman-ancaman yang bersifat internal bagi kedaulatan, keutuhan teritorial, serta keselamatan bangsa dan negara ketimbang ancaman-ancaman eksternal seperti persaingan dengan Singapura dan Malaysia di Asia Tenggara dalam persepsi tipologi ancaman keamanan nasional.¹³

Secara normatif, tidak adanya perubahan doktrin pertahanan Indonesia akan mempengaruhi tingkat operasional postur pertahanan. Hal ini tentu saja akan menciptakan postur pertahanan yang tidak bisa “bertahan” dalam menjalankan fungsi pertahanannya sebagai alat negara dalam menghadapi ancaman eksternal dan dalam menopang peran Indonesia dalam sistem internasional. Pembangunan postur pertahanan bertujuan sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Karena itu, upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan pengembangan postur pertahanan yang diarahkan doktrin pertahanan. Doktrin pertahanan sebuah negara merupakan elemen dasar dalam bagaimana sebuah negara mengembangkan kekuatan,

¹¹ Alexandra R. Wulan (ed), *Satu Dekade Reformasi Militer Indonesia*, Indonesia: Pacivis Universitas Indonesia dan Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia Office, 2008.

¹² Andi Widjajanto, *Ringkasan Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi*, yang diakses pada 12 Desember 2008, melalui [http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/doktrin](http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/doktrin%20ad%20kartika%20eka%20paksi.pdf)

¹³ *Ibid*

kemampuan, dan gelar atau strategi pertahanan yang bertujuan untuk merefleksi dan menghadapi perubahan atmosfer lingkungan strategisnya. Cara pandang doktrin pertahanan akan mempengaruhi pengembangan postur pertahanan yang disesuaikan dan ditujukan untuk menghadapi ancaman dan persaingan di lingkungan strategisnya merupakan sebuah langkah *balancing* atau strategi sebuah negara untuk mendukung kebijakan luar negeri dan menciptakan strategi pertahanan.

Lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara tidak terlepas dari pengaruh global. Adanya manifestasi teror yang dialami Amerika Serikat pada 11 September 2001 dengan maksud untuk memporak-porandakan suatu masyarakat juga mendapat reaksi keras di Asia Tenggara. Gejala 11 September 2001 itu menyadarkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bahwa terorisme merupakan ancaman besar bagi mereka.¹⁴ Dengan kata lain, terorisme menjadi ancaman keamanan dan stabilitas regional yang jauh lebih sulit ditebak, karena sifatnya yang *amorphous*, tidak berbentuk, serta tidak mengakui batas-batas negara dan kedaulatan dalam operasinya.¹⁵ Dalam lingkup luas, perubahan itu terlihat pada agenda keamanan global yang mengarahkan perhatian dunia pada ancaman terorisme bentuk baru (*new terrorism*).¹⁶ Perubahan tersebut juga terkait dengan Asia Tenggara sebagai kawasan yang diidentifikasi sebagai daerah yang paling tidak aman di dunia (*among world's most troubled areas*) mengingat munculnya gerakan Islam “garis keras” yang banyak dikaitkan dengan Al-Qaeda.¹⁷ Meski selain itu terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan kawasan Asia Tenggara, seperti adanya kepentingan atas kekayaan sumber laut dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan keamanan maritim yang menjadi perhatian utama dari angkatan laut untuk mengatasi berbagai ancaman kedaulatan nasional yang berasal dari faktor eksternal, seperti persoalan bajak

¹⁴ C.P.F. Luhulima, *Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara*, dalam Jurnal Analisis CSIS, Tahun XXXII/2003 No. 1, Jakarta: CSIS, 2003. h. 32

¹⁵ *Ibid*, h. 39

¹⁶ Connie Rahakundini Bakrie, *loc. cit*, h. 64

¹⁷ Damien Kingsbury dalam Connie Rahakundini Bakrie, *Ibid*, h. 64-65

laut, penyelundupan senjata, masalah narkoba, sampai pada imigran gelap.¹⁸ Karena itu, dalam konteks keamanan regional di kawasan Asia Tenggara, sejumlah isu keamanan masih mewarnai kawasan ini, seperti konflik yang bersumber pada klaim teritorial, keamanan jalur pelayaran dan perdagangan, terorisme, perompakan, bajak laut, dan penyelundupan.¹⁹

Keberadaan tingkat ancaman sebagai hasil dari lingkungan strategis yang telah mengalami banyak perubahan sebagai hasil dari dinamika perubahan politik, sepertinya tidak berjalan searah dengan pembangunan postur pertahanan Indonesia. Pada kenyataannya, ketika lingkungan strategisnya mengalami perubahan, pengembangan postur pertahanan Indonesia justru tidak merespon perubahan tersebut, khususnya pada periode pasca 9/11. Kondisi nyata postur TNI sudah sesuai dengan target lima tahunan (tahun 2000-2005), dengan jumlah 363.191 prajurit, namun pemenuhan materiil dan alutsista belum dapat terpenuhi.²⁰

Di satu sisi, besaran alokasi anggaran pertahanan sebuah negara dalam menopang kekuatan militer dalam membentuk postur pertahanan merupakan salah satu sebab-akibat yang mempengaruhi kemampuan pertahanan sebuah negara. Pembangunan kekuatan militer minimnya kemampuan sumber daya nasional untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pertahanan yang ideal. Dukungan alokasi anggaran yang begitu minim membuat keterbatasan kemampuan keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan pertahanan. Situasi empirisnya menjelaskan bahwa Indonesia hanya mengalokasikan anggaran pertahanan negara sebesar 1% dari PDB (Produk Domestik Bruto) yang mempengaruhi proses pengembangan kekuatan militer. Tahun 2001, Indonesia hanya mampu menyuplai dana untuk pembangunan pertahanan sebesar 0,73%. Tahun 2002, kenaikan anggaran hanya sebesar 0,3% atau sebesar 0,76%. Tahun 2003 kenaikan anggaran pertahanan belum begitu signifikan, yaitu hanya menjadi 0,94%, begitupun sampai dengan

¹⁸ Craig Snyder, *Maritime Security in Southeast Asia*, dalam Kingsbury (ed), *Violence in Between: Conflict and Security in Archeipelagic Southeast Asia*, dalam Connie Rahakundini Bakrie, *Ibid*, h. 65

¹⁹ Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Analisa Lingkungan Strategis, *Perkembangan Lingkungan Strategis dan Prediksi Ancaman Tahun 2008*, Januari, 2008. h. 6

²⁰ Connie Rahakundini Bakrie, *loc. cit*, h. 102

tahun 2004 dimana anggaran pertahanan hanya mampu menyuplai 1,08%.²¹ Hal tersebut tidak memungkinkan untuk menempatkan kekuatan pertahanan Indonesia berdiri sejajar dengan negara-negara lain di kawasan.²² Sebagai pembanding, anggaran pertahanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, kebanyakan memiliki anggaran pertahanan di atas 1% dari PDB negara masing-masing. Beberapa negara bahkan mengalokasikan anggaran pertahanannya 4%-5% dari PDB-nya.²³ Perbedaan alokasi anggaran belanja militer di kawasan, Indonesia dapat digolongkan tertinggal dalam pembangunan angkatan bersenjata dibandingkan dengan negara-negara lainnya, padahal Indonesia tercatat sebagai negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara.²⁴ Anggaran pertahanan Indonesia yang terbatas membuat usaha untuk memenuhi kebutuhan pertahanan minimal menjadi prioritas program *arms maintenance*.²⁵ Pelaksanaan program *arms maintenance* tentu tidak, secara signifikan, meningkatkan kekuatan postur pertahanan Indonesia. Posisi alutsista Indonesia di tahun 2004 tidak secara signifikan berbeda dengan posisi alutsista di tahun 2000.²⁶

Adanya perubahan lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara pasca 9/11 dengan semakin meningkatnya ancaman non-konvensional dan pengembangan postur pertahanan yang dilakukan negara-negara lain melalui penguatan kekuatan militer, ternyata tidak memberikan pengaruh pada cara pandang doktrin pertahanan dalam membangun modernisasi dan pengembangan postur pertahanan Indonesia. Proses postur pertahanan Indonesia terkesan berjalan stagnan. Stagnasi tersebut tentu akan mempengaruhi kemampuan politik dan

²¹ Alokasi anggaran Pertahanan Indonesia yang berada pada level di bawah 1% dari PDB membuat Indonesia tidak memiliki kemampuan dalam membangun kekuatan militernya. Secara normatif, alokasi anggaran Pertahanan Indonesia selayaknya berada pada level 2-3% dari PDB. Tindakan ini merupakan sebagai sebuah strategi *balancing* Indonesia dalam mengimbangi kekuatan alokasi anggaran pertahanan negara-negara lain yang berada pada level 3-4% dari PDB-nya.

²² Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Pertahanan Indonesia, dalam Monograph No. 10, 10 November 2007, Propatria Institute: Working Group on Security Sector Reform, h. 16

²³ Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia 2003, *Indonesia: Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, h. 101

²⁴ Connie Rahakundini Bakrie, *loc. cit.*, h. 121

²⁵ Andi Widjajanto, *Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia*, diakses pada 12 Desember 2008 melalui <http://www.propatria.or.id/loaddown/Paper%20Diskusi/Evolusi%20Doktrin%20Pertahanan%20Indonesia%20-%20Andi%20Widjajanto.pdf>

²⁶ *Ibid*

pertahanan Indonesia dalam tataran sistem dalam merefleksi persaingan dan ancaman.

1.2 Perumusan Masalah

Secara konseptual, postur pertahanan harus mampu menghadapi perkembangan atmosfer yang meliputinya, karena itu pembentukan postur pertahanan harus mampu menjawab tantangan perubahan politik yang menentukan lingkungan strategisnya. Dengan kata lain, arah kebijakan doktrin pertahanan harus mampu melihat secara *outward-looking* untuk menciptakan postur pertahanan yang merefleksi tipologi ancaman, bentuk konflik, dan eskalasi konflik sebagai hasil dinamika lingkungan strategis yang juga terus mengalami perubahan yang berbanding lurus dengan tingkat perubahan politik, baik dalam level global, kawasan, dan negara.²⁷ Dalam hal Indonesia, lingkungan strategis yang melingkupinya, khususnya pasca 9/11, adalah mengemukanya ancaman terorisme internasional yang dibarengi dengan semakin meningkatnya ancaman non-konvensional yang mengakibatkan negara-negara lain, baik dalam level global, seperti Amerika, China, dan India, maupun regional, seperti Singapura dan Malaysia, yang secara intensif memodernisasi postur pertahanannya melalui pengembangan kekuatan militer untuk merefleksi persaingan dan ancaman.

Selain itu, struktur anarki dalam sistem internasional juga membentuk hubungan antarnegara yang mengarah pada terjadinya konflik.²⁸ Hubungan konfliktual terjadi karena eksistensi sebuah negara adalah ancaman bagi negara lainnya.²⁹ Dalam konteks ini, negara dapat melakukan atau mencapai keamanan dengan dua cara, yaitu dengan upaya internal, yaitu meningkatkan kapabilitas ekonomi, meningkatkan kekuatan militer, dan mengembangkan strategi dan upaya eksternal, yaitu memperkuat dan memperluas aliansi atau melemahkan dan

²⁷ Ikrar Nusa Bhakti, *Geopolitik. Lingkungan Strategis Asia Pasifik, dan Arah Kebijakan Pertahanan Indonesia di Masa Mendatang*, dalam dalam Sri Yanuarti, *Kaji Ulang Pertahanan Indonesia*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI (P2P-LIPI), 2004, h. 13

²⁸ John Glenn, Darryl Howlett, Stuart Poore (eds), *Neorealism Versus Strategic Culture*, USA: Ashgate Publishing Limited, 2004, h. 5

²⁹ Barry Buzan, *People, States, and Fear*, New York: Harvester Wheatsheaf, 1991, h. 1

meminimalisasi kekuatan lawan, sebagai bentuk dari maksimalisasi kekuatan atau strategi untuk mencapai makna *security*.³⁰

Ancaman terorisme, non-konvensional lainnya, dan modernisasi postur pertahanan negara lain, baik di kawasan maupun di luar kawasan yang memiliki pengaruh global, merupakan *outcome* lingkungan strategis di Asia Tenggara. Indonesia, secara normatif, dapat membangun postur pertahanan untuk merespon lingkungan strategisnya. Karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa **“mengapa pengembangan Postur Pertahanan Indonesia tidak merefleksi perubahan Lingkungan Strategis di kawasan Asia Tenggara periode 2001-2004?.**

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Menjelaskan cara pandang doktrin pertahanan dan postur pertahanan Indonesia serta perubahan lingkungan strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara periode 2001-2004.
- 1.3.2 Mengidentifikasi tipologi ancaman, bentuk konflik, dan eskalasi konflik sebagai hasil dari dinamika lingkungan strategis, terutama di kawasan Asia Tenggara dan cara pandang doktrin pertahanan dan pengembangan postur pertahanan Indonesia dalam periode 2001-2004.

1.4 Signifikansi Penelitian

- 1.4.1 Mempertajam wawasan cakrawala peneliti dalam memahami doktrin pertahanan dan bentuk postur pertahanan Indonesia, terutama dalam periode 2001-2004.
- 1.4.2 Memperdalam wawasan cakrawala peneliti dalam memahami lingkungan strategis dan mengidentifikasi ancaman, bentuk konflik, dan eskalasi konflik sebagai hasil dari dinamika lingkungan strategis dan doktrin pertahanan serta keadaan postur pertahanan Indonesia, terutama periode 2001-2004.

³⁰ John Glenn, Darryl Howlett, Stuart Poore (eds), *op. cit*

1.5 Tinjauan Pustaka

Bagian Tinjauan Pustaka pada penelitian ini, pertama, menggunakan tulisan Ikrar Nusa Bhakti yang berjudul *Geopolitik, Lingkungan Strategis Asia Pasifik, dan Arah Kebijakan Pertahanan Indonesia di Masa Mendatang*, dalam *Kaji Ulang Pertahanan Nasional: Perspektif Politik*, dengan Editor Sri Yanuarti.³¹ Dalam tulisan penelitian yang merupakan gabungan hasil studi literatur dan studi lapangan ini, Ikrar Nusa Bhakti memulai argumentasinya dalam keterkaitan antara Geopolitik dan Lingkungan Strategi, yaitu pendekatan geopolitik yang memiliki kaitan erat dengan analisis perkembangan lingkungan strategis. Selain itu, peneliti berpendapat bahwa perkembangan lingkungan strategis, baik pada tingkat global dan regional, perlu dicermati oleh para analisis, perancang, pembuat, dan pengambil keputusan politik luar negeri dan pertahanan di Indonesia agar kita dapat *survive* dan berjaya di abad ke-21 ini.³²

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa secara singkat lingkungan strategis yang mempengaruhi kebijakan pertahanan Indonesia, Karena itu, ada terdapat beberapa hal penting yang dikemukakan oleh peneliti yang diuraikan dalam empat bagian. Bagian pertama akan membahas perkembangan dan kecenderungan pada tingkat global. Bagian kedua menggambarkan dan menganalisa perkembangan dan kecenderungan di lingkungan strategis pada tingkat regional Asia Pasifik. Bagian ketiga menelaah perkembangan domestik. Bagian keempat menggambarkan implikasi perkembangan lingkungan strategis tersebut terhadap arah kebijakan politik luar negeri dan pertahanan nasional.

Argumentasi utama Ikrar Nusa Bhakti adalah lingkungan strategis – baik pada tingkat global, regional, maupun nasional – akan mempengaruhi keseluruhan arah kebijakan politik luar negeri dan pertahanan nasional, termasuk pembangunan kemampuan diplomasi Indonesia, pembangunan kekuatan, serta

³¹ Ikrar Nusa Bhakti, *Geopolitik, Lingkungan Strategis Asia Pasifik, dan Arah Kebijakan Pertahanan Indonesia di Masa Mendatang*, dalam Sri Yanuarti, *loc. cit*

³² *Ibid*

kebijakan strategis apa yang akan diambil dan dioperasionalkan untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis itu.³³

Dalam pandangan peneliti, perkembangan dan kecenderungan global adalah implikasi globalisasi di bidang keamanan dan pertahanan, serta ekonomi nasional dan integrasinya ke dalam ekonomi global, yang kemudian menghasilkan interdependensi yang menyebabkan kerentanan terhadap tekanan negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang dalam pasar, investasi, dan teknologi negara-negara maju, karena interdependensi juga diiringi oleh potensi friksi ekonomi dan politik, serta hadirnya globalisasi juga menimbulkan kerawanan akibat munculnya aktor-aktor non-negara yang menciptakan masalah-masalah transnasional, seperti kejahatan lintas negara.³⁴

Dalam konteks regional di kawasan Asia Pasifik, Ikrar Nusa Bhakti melihat adanya kepentingan negara-negara besar dan kecenderungan kerjasama keamanan multilateral, seperti ASEAN dan ARF, dan dinamika kerjasama dan kompetisi ekonomi regional, serta potensi konflik antarnegara dan peningkatan arti penting isu dan masalah kejahatan lintas batas.³⁵ Dalam konteks domestik, penelitian ini menyoroti, pertama, dinamika reformasi total pada tataran nasional pada bidang politik, penegakan hukum, konstitusi, dan perundang-undangan. Kedua, transisi dari sentralisasi ke desentralisasi yang merupakan sebuah proses transisi kekuasaan pemerintahan dan ketiga, permasalahan gerakan separatis di Aceh dan Papua, serta proses pemulihan ekonomi yang mempengaruhi stabilitas keamanan nasional, dan terakhir, adalah terorisme dalam negeri yang memiliki kaitan erat dengan jaringan terorisme internasional.³⁶

Kesimpulan dari analisa penelitian ini menjelaskan bahwa lingkungan strategis Asia Pasifik memiliki kemungkinan untuk terjadinya perang antarnegara amatlah mustahil, sehingga hal ini memungkinkan bagi Indonesia untuk memulihkan dan membangun ekonomi dan kapabilitas pertahanannya dalam situasi yang kondusif, meski ancaman terberat datang dari kejahatan lintas negara,

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

mengingat letak geografis Indonesia merupakan wilayah pertemuan interaksi antaraktor.³⁷

Sumber Tinjauan Pustaka kedua menggunakan hasil penelitian yang ditulis oleh Connie Rahakundini Bakrie, berjudul *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, yang salah satu sub judul penelitiannya menjelaskan dan menggambarkan Postur Pertahanan Nasional Indonesia atau TNI.³⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk menyoroti kondisi faktual terkait dengan postur TNI sampai pada tahun 2006. Kondisi tersebut digambarkan berdasarkan jumlah prajurit, baik AD, AL dan AU, yang dianggap tidak sepadan jika dibandingkan dengan besarnya wilayah geografis Indonesia, meski hal tersebut masih *debatable*. Hal tersebut masih diperumit dengan kondisi alutsista yang usianya telah mencapai 25-40 tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa postur kekuatan TNI masih jauh dari standar. Argumentasi utama Connie adalah kondisi nyata postur kekuatan TNI pada tahun 2006 ini pada dasarnya sudah sesuai dengan target yang harus dicapai pada akhir program lima tahun pertama, 2000-2005, yaitu sebanyak 363,191 prajurit, namun pemenuhan materiil dan alutsista yang ditargetkan belum dapat terpenuhi.³⁹ Mengacu pada kondisi faktual tersebut, Connie menyatakan dan bahkan, mempertanyakan bagaimana kita bisa dan mampu menjamin keutuhan dan kedaulatan NKRI serta keselamatan segenap bangsa dari semua ancaman yang mungkin timbul kalau kekuatan pertahanan kita tidak memadai.⁴⁰

Sumber tinjauan pustaka ketiga menggunakan rumusan tulisan yang berjudul *Konsepsi Postur Pertahanan Negara 2004-2014* yang dirumuskan oleh Departemen Pertahanan, dalam hal ini Balitbang Dephan.⁴¹ Tujuan tulisan ini menjelaskan bahwa kebijakan pertahanan negara merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam menciptakan kondisi politik nasional dan internasional untuk melindungi nilai-nilai vital nasional terhadap ancaman dari

³⁷ *Ibid*

³⁸ Connie Rahakundini Bakrie, *loc. cit*, h. 101

³⁹ *Ibid*, h. 102

⁴⁰ *Ibid*, h. 103

⁴¹ Pokja Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, *Konsepsi Postur Pertahanan Negara 2004-2014*, yang diakses melalui <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mnorutisi=6&vnomor=15>, pada tanggal 21 September 2008

lingkungan internal dan eksternal.⁴² Rumusan tulisan ini menggambarkan kondisi pertahanan negara yang meliputi, komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Komponen utama dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kemampuan, kekuatan, dan gelar.

Kemampuan meliputi kemampuan pertahanan, intelijen strategis, operasi militer selain perang dan kemampuan dukungan. Kekuatan menggambarkan jumlah personil yang terdiri dari personil TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Sedangkan Gelar menjelaskan jumlah kekuatan TNI AD, yaitu Kodam yang tersebar di beberapa wilayah. Sedangkan kekuatan TNI AL, yaitu Armabar dan Lanal Kelas A, yang tersebar di beberapa wilayah, dan kekuatan TNI AU, yaitu Skadron dan Kosek yang juga tersebar pada beberapa wilayah. Sementara Komponen Cadangan adalah sebuah komponen yang merupakan kompi bala cadangan, serta Komponen Pendukung, yang merupakan segenap warga negara, sumber daya alam, dan buatan.⁴³

1.6 Kerangka Pemikiran: Teori Postur Pertahanan Ofensif-Defensif dan Konsep Lingkungan Strategis

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua kerangka pemikiran, yaitu kerangka konsep lingkungan strategis yang menggunakan pemikiran W. Michael Guilliot dan Libor Frank. Sementara, kerangka operasionalisasi menggunakan teori postur pertahanan dalam tulisannya Stephen van Evera yang berjudul *Offense, Defense, and the Causes of War*, yang nantinya akan dioperasionalkan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Diskusi mengenai lingkungan strategis adalah sebuah analisa mengenai negara dan penafsiran untuk melakukan antisipasi perkembangan ancaman. Sementara, teori ofensif-defensif dapat dipahami penggambaran pada bagaimana bentuk dan karakteristik cara pandang doktrin pertahanan dan kemampuan postur pertahanan atau aktualisasi atas kemampuan negara dalam merefleksi lingkungan strategisnya untuk mencapai keamanan nasional. *Inward-looking* doktrin pertahanan menjelaskan karakter doktrin pertahanan yang defensif terhadap

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

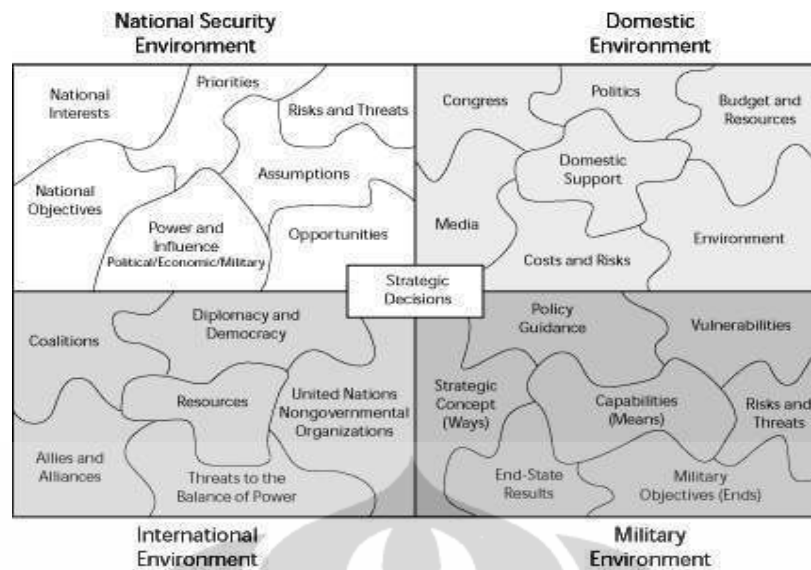
situasi eksternal atau cara pandang yang hanya menekankan pada situasi domestik saja, sementara *outward-looking* doktrin pertahanan menjelaskan karakter doktrin sebuah negara yang ofensif atau berdasarkan pada situasi di luar kawasan atau melihat keluar batas nasional sebagai referensi pemahaman para pemimpin atau pengambil kebijakan dalam merumuskan doktrin pertahanan. Cara pandang doktrin pertahanan, baik *inward-looking* maupun *outward-looking*, pada akhirnya, akan menuntun pengembangan postur pertahanan yang, secara normatif, ditujukan untuk merespon ancaman dan persaingan eksternal.

Sementara itu, Lingkungan strategis dapat dipahami, seperti yang dijelaskan W. Michael Guillot,⁴⁴ yaitu:

“One construct includes four distinct, interrelated parts: the national security, domestic, military, and international environment (lihat gambar. 1). Within the strategic environment, one must consider many factors and actors. This construct is neither a template nor checklist-nor a recipe for perfection. The framework recognizes the fact that one must conceptualize in both political and military realms. Additionally, it illustrates how the strategic environment is interrelated, complementary, and contradictory.

Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa lingkungan strategis sebuah negara terkait dengan keamanan bernegara yang menekankan pada pentingnya analisa bidang politik dan militer. Kerangka pemikiran ini memberikan keleluasaan dalam melihat atmosfer politik dan militer sebagai bagian analisa aktor dan faktor yang mempengaruhi hubungan bernegara, khususnya bidang politik dan militer, terutama yang meliputi atmosfer yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

⁴⁴ Michael W. Guillot, *Strategic Leadership: Defining the Challenge*, Air and Space Journal, Maxwell AFB: Winter, 2003, .Vol 17, Iss4. h. 3



Gambar 1.1: Lingkungan Strategis

Dalam pendapat lainnya, Libor Frank beranggapan bahwa lingkungan strategis adalah:

“Security environment is an external environment affecting national security policy. It can be seen as an area where national interest are implemented and where these face interest of other actors within the system of international relations and where those processes take place substantially influencing the level of national security.....Basically, its nature is influenced by the anarchic system of international relations where any supranational sovereign power absents to determine and effectively enforce “rules” and so to regulate behavior of actors within this system.”⁴⁵

Karena itu, lingkungan strategis akan menggambarkan adanya potensi bentuk dan eskalasi konflik, penilaian potensi ancaman, dan penilaian kapabilitas yang harus dikembangkan. Konflik yang terjadi sebagai akibat dari faktor kekuatan militer yang didefinisikan sebagai ancaman eksternal, baik antarnegara bertetangga atau dalam kawasan regional yang cenderung dipengaruhi oleh kondisi angkatan bersenjata dan skema gelar kekuatan yang dapat menyebabkan terjadinya perang. Stephen van Evera, dalam tulisannya yang berjudul *Offense, Defense, and the Causes of War*, menjelaskan alasan-alasan penyebab terjadinya

⁴⁵ Libor Frank, *The Czech Republic Security Environment*, diakses pada 20 Agustus 2008 melalui http://www.army.cz/mo/om/obrana_a_strategic/1-2003eng/frank.pdf

perang, yaitu adanya dominasi ofensif, ketidakmampuan negara dalam melakukan *self-defense*, kelemahan sebuah negara akan memicu negara lain melakukan ekspansi, pertimbangan *first strike* jauh lebih menguntungkan daripada *pre-emptive strike*, kesempatan yang berhadapan dengan kerentanan, negara cenderung menerima kenyataan dalam mengandalkan taktik diplomasi, meski taktik diplomasi terkadang menjadi pemicu perang, kegagalan diplomasi yang mengarah pada persengketaan, kecenderungan negara dalam menyelimuti kebijakan luar negeri dan pertahanan atau tidak adanya transparansi antaraktor, seringkali menyebabkan adanya miscalculasi dan *blunder* diplomasi, dan adanya perlombaan senjata yang semakin sulit dikontrol, serta dominasi ofensif yang mempengaruhi negara dalam mengadopsi kebijakan luar negerinya.⁴⁶ Karena itu, sebuah negara perlu memperhatikan dinamika yang menggambarkan fenomena dan perkembangan militer dan politik di lingkungan strategisnya.

Stephen van Evera juga menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi postur pertahanan sebuah negara yang menentukan sikap responsif terhadap lingkungan strategisnya, yaitu faktor militer, faktor geografis, faktor rezim politik dan sosial domestik, dan faktor diplomasi.⁴⁷ Faktor pertama adalah militer. Dimensi militer yang menekankan pada perkembangan variabel teknologi militer, doktrin, dan kekuatan postur militer dan penempatan kekuatan militer. Teknologi militer mendukung kekuatan agresi atau bertahan. Pada masa lalu, teknik benteng pertahanan akan menciptakan sistem pertahanan yang kuat, di sisi lain, metode pengepungan akan memperkuat penyerangan. Lahirnya teknologi sanggudi yang digunakan untuk membantu kekuatan pertahanan. Teknologi ini digunakan untuk menopang kekuatan kereta pertempuran dan pasukan kavaleri. Dalam penyerangan, terciptanya teknologi baju baja sangat mendukung kekuatan infanteri yang besar ketika melakukan penyerangan untuk menerobos benteng pertahanan. Pada era modern, teknologi-teknologi yang dapat menopang kekuatan pertahanan adalah senjata mematikan seperti senjata mesin, sedangkan hadirnya kekuatan teknologi seperti tank yang secara signifikan mendukung kekuatan penyerangan. Teknologi-teknologi ini

⁴⁶ Stephen Van Evera, *loc. cit.*, h. 5

⁴⁷ *Ibid.*, h. 16

kemudian menjadi pilihan-pilihan dalam mempersenjatai dan melengkapi pasukan militer. Pada era revolusi Perancis, kekuatan militer Perancis menjadi sangat ofensif. Hal itu didukung oleh kekuatan teknologi yang menopang kemampuan militer Perancis dalam melakukan operasi militer. Selain itu, terkadang kombinasi teknologi dan doktrin mempengaruhi kemampuan ofensif dan defensif, namun peranan teknologi juga terkadang mengesampingkan peranan doktrin, seperti yang terjadi pada tahun 1914-18 dan 1945-91 (ketika militer negara-negara *superpower* menerapkan doktrin ofensif namun cenderung tidak melakukan serangan ofensif dalam menyikapi revolusi nuklir). Hal sebaliknya juga cenderung terjadi. Terkadang doktrin justru mendorong terciptanya teknologi. Tahun 1939-45, ketika dorongan doktrin Blitzkrieg untuk membentuk kekuatan ofensif memaksa lahirnya teknologi tank yang dapat digunakan dalam melakukan penyerangan. Di sisi lain, keseimbangan antara ofensif-defensif ditentukan oleh kemampuan sebuah negara dalam melakukan strategi *military posture and force deployment* atau kekuatan postur militer dan penempatan kekuatan militer. Pada tahun 1939-41, Stalin melakukan pengimbangan kekuatan untuk menghadapi Hitler dengan menggunakan strategi pertahanan yang menempatkan Red Army atau Pasukan Merah di daerah-daerah Polandia, Bessarabia, Finlandia, dan negara-negara Baltik lainnya. Situasi ini mempermudah Uni Soviet untuk melakukan penyerangan ke Jerman, namun sebaliknya, Jerman akan sulit melakukan serangan ke Uni Soviet. Hal yang sama dilakukan Amerika dengan mengimbangi serangan dengan Jepang dengan menempatkan armadanya di Pearl Harbour dan pasukan pembom atau bomber di Filipina. Hal serupa juga dilakukan Mesir dengan menempatkan pasukannya di Gurun Sinai untuk mengimbangi kekuatan Israel. Selain itu, negara-negara dapat merubah bentuk keseimbangan ofensif-defensifnya melalui pelaksanaan operasi militer dalam keadaan perang.

Faktor kedua adalah geografis. Keadaan geografis mempengaruhi pengerahan kekuatan militer untuk melakukan penaklukan pada sebuah wilayah. Lingkup geografis, seperti laut, danau, pegunungan, sungai, hutan lebat, gurun pasir yang luas, dan keadaan alam lainnya dapat menjadi kendala dalam melakukan penyerangan. Bahkan, *human-made obstacles* atau sekat yang sengaja dibuat untuk melakukan penghalangan di daerah perbatasan pun dapat menjadi

alat utama untuk melakukan pertahanan. Keadaan geografis sebuah negara yang terdiri dari pegunungan atau hutan lebat, dan adanya tingkat populasi masyarakat banyak tinggal di daerah pinggiran, dapat dengan mudah melakukan upaya pertahanan dengan mengandalkan teknik gerilya. Selain itu, kondisi sebuah negara dengan situasi perekonomian yang mapan dan adanya kemampuan sebuah negara untuk menyuplai bahan-bahan logistik yang dibutuhkan sehari-hari ketika terjadi blokade lawan, juga merupakan penghalang bagi negara lain atau kekuatan militer lawan untuk menaklukkan. Secara geografis, kemampuan bertahan negara-negara Eropa Barat jauh lebih baik karena ditopang oleh keadaan alam yang mayoritas dikelilingi oleh barisan pegunungan dibandingkan dengan Israel. Luas wilayah Israel sangat kecil dan rentan mengingat adanya kegiatan industri dan populasi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang langsung berbatasan dengan negara lain, karena itu keadaan geografis Israel tidak memungkinkan untuk melakukan taktik gerilya. Pada tataran negara, berdasarkan pada lingkup teritorial dan seperti halnya negara-negara lain, Indonesia adalah sebuah negara dipengaruhi oleh negara-negara yang memiliki batas-batas teritorial langsung dan terletak pada kawasan regional Asia Tenggara, dan memiliki interaksi dengan negara kuat (*major power*) dan aktor non-negara, seperti aktor-aktor kejahatan transnasional, baik pada level regional maupun global.

Faktor geografi memiliki 3 nilai strategis bagi kepentingan keberlangsungan hidup: pertama, bahwa geografi adalah area bermain bagi mereka yang merancang dan melaksanakan suatu strategi; kedua, bahwa geografi adalah parameter fisik yang secara unik membentuk pilihan-pilihan teknologi, taktik, sistem logistik, institusi, dan budaya militer suatu bangsa; dan ketiga, bahwa geografi merupakan suatu inspirasi yang membentuk pemahaman bersama tentang perpolitikan dalam batas-batas fisik geografis tersebut. Maka tidak heran ketika Colin S. Gray mengatakan bahwa *All politics is geopolitics, all strategy is geostrategy; geography is out there objectively as environment or terrain; geography also is within us, in here, as imagined spatial relationship*. Geografi membentuk karakteristik strategis dan karakteristik militer dari suatu

masyarakat atau negara apakah akan bersifat kontinental, perairan, atau kondisi-kondisi tertentu.⁴⁸

Kekuatan militer diorganisir berdasarkan lingkungan atau matra operasi mereka yang terdiri dari darat, air, udara, dan ruang angkasa dengan menggunakan instrument khusus atau taktik khusus yang secara geografis unik untuk suatu wilayah tertentu untuk tujuan efisiensi dan efektifitas. Memahami geografi sebagai bagian integral dari suatu strategi akan memberikan pemahaman bahwa hanya strategi yang didasarkan atas kondisi geografi yang memberikan kekuatan kepada suatu negara atau masyarakat. Jadi, aspek paling penting dari geografi terhadap strategi adalah tersedianya ruang gerak dan keunggulan-keunggulan kondisi geografis tertentu dalam mengembangkan strategi dan kekuatan pertahanan.⁴⁹

Faktor ketiga adalah popularitas rezim politik dan sosial domestik sebuah negara turut menentukan kemampuan ofensif atau defensif. Rezim yang populer akan dengan mudah melakukan penyerangan atau bahkan bertahan dibandingkan dengan rezim yang kurang populer. Rezim pemerintahan yang populer cenderung mendapat dukungan masyarakat. Hal ini mendukung terciptanya kekuatan pasukan militer yang besar, disertai dengan tingkat loyalitas pasukan. Kekuatan militer yang besar dan loyalitas yang ditunjukkan pasukan militer akan mempengaruhi pelaksanaan operasi militer, terutama operasi militer dengan dukungan logistik minimal. Selain itu, rezim yang populer akan dengan mudah mengorganisasikan warga negara untuk melaksanakan taktik gerilya yang mendukung kekuatan pertahanan sebuah negara. Sedangkan masyarakat yang hidup dalam kungkungan kekuatan rezim oligarki yang tidak populer, cenderung berpihak pada lawan.

Faktor keempat adalah diplomasi pertahanan. Sifat diplomasi berfungsi untuk memperkuat pertahanan mengingat pengaruhnya terhadap sifat ofensif-defensif postur pertahanan sebuah negara. Ada tiga jenis pengaturan diplomasi.

⁴⁸ Edy Presetyono, Director, Defense Planning Division, Strategi, Perencanaan, Pengembangan Kekuatan serta Diplomasi Pertahanan, diakses melalui http://www.iodasindonesia.com/defense_planning.html pada 11 Maret 2009

⁴⁹ *Ibid*

Pertama, sistem keamanan kolektif atau *collective security system*. Negara-negara yang tergabung dalam sistem keamanan kolektif (e.g. Liga Bangsa-Bangsa) dituntut untuk secara bersama-sama menghadapi negara anggota lainnya yang melanggar prinsip aturan atau agresor. Kedua, aliansi pertahanan atau *defensive alliance*. Negara-negara yang tergabung dalam aliansi pertahanan bekerjasama menghadapi ancaman dari luar atau *outside aggressors*. Ketiga, tindakan pengimbangan oleh negara-negara yang bersifat netral atau *balancing behavior by neutral states*. Negara-negara yang bersifat netral melakukan *balancing* kekuatan dalam kerangka koalisi dengan negara-negara yang tidak memiliki kekuatan dengan tujuan untuk menghentikan tindakan agresi. Dalam level domestik, regional dan internasional, terutama pada situasi pasca 9/11, Indonesia mesti merujuk pada perkembangan politik, militer, dan fenomena yang terjadi. Untuk memahami lingkungan militer yang mempengaruhi perkembangan politik dalam lingkungan strategis sebuah negara, perlunya mencermati faktor-faktor yang menentukan klasifikasi ofensif-defensif kekuatan postur pertahanan sebuah negara. Berdasarkan lingkup teritorialnya, lingkungan strategis dapat dibedakan menjadi tiga jenis.⁵⁰ Pertama, *immediate security environment*, yang mencakup negara-negara yang bertetangga yang memiliki batas-batas teritorial langsung, yang dapat memberikan dampak situasi krisis. Kedua, *close security environment*, yang meliputi kawasan regional yang lebih luas. Ketiga, *wide security environment*, yang mencakup negara-negara kuat (*major power*) regional dan global. Di lingkungan ini, pengaruh negara-negara yang relatif lebih lemah (*less power*) sangat terbatas dan keterlibatannya hanya di forum-forum internasional seperti PBB. Penjelasan di atas menggambarkan bahwa dinamika lingkungan, baik regional maupun internasional, terkait erat dengan persepsi inheren suatu negara (*main characteristic and inherent perception of typical features of security environment*), konteks geopolitik (*global nature of the environment where the nation exists and inherent perception of own position within it*), ancaman (sifat, bentuk, dan tingkat), dan sifat militer (kondisi angkatan bersenjata dan skema gelar kekuatan).⁵¹

⁵⁰ Libor Frank, *loc. cit*

⁵¹ Oskar Krejci dalam Libor Frank, *loc. cit*

1.7 Asumsi

- 1.7.1 Adanya tipologi ancaman, bentuk konflik, dan eskalasi konflik sebagai hasil dinamika lingkungan strategis yang terus mengalami perubahan yang berbanding lurus dengan tingkat perubahan politik.
- 1.7.2 Doktrin pertahanan yang bersifat *inward-looking* dan *outward-looking* yang mempengaruhi pengembangan Postur Pertahanan sebagai kebutuhan utama Indonesia dalam merefleksi ancaman dan konflik, serta *balancing* di kawasan Asia Tenggara.

1.8 Hipotesis

Postur Pertahanan Indonesia tidak merefleksi lingkungan strategisnya di kawasan Asia Tenggara karena tidak adanya perubahan doktrin pertahanan dari *inward-looking* menjadi *outward-looking*.

1.9 Model Analisis



1.10 Operasionalisasi Konsep

Implementasi konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini akan menjabarkan proses berpikir yang digunakan sebagai alat analisa dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan dua pemikiran utama, yaitu konsep lingkungan strategis dan teori postur pertahanan ofensif-defensif. Penjabaran konsep lingkungan strategis dan teori ofensif-defensif akan dijabarkan pada diagram berikut di bawah ini:



Lingkungan Strategis



1.11 Hubungan Antarkonsep

Hubungan dan keterkaitan antara dua kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan dalam batasan pertanyaan penelitian yang menjelaskan bagaimana kerangka konsep lingkungan strategis digunakan bagi negara dalam mengidentifikasi bentuk dan eskalasi konflik, dan tingkat ancaman. Dengan kata lain, konsep lingkungan strategis akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara dan ancaman yang dihasilkan. Analisa ancaman lingkungan strategis kemudian dianalisa sebagai faktor yang menentukan cara pandang doktrin pertahanan yang apakah bersifat defensif dengan tidak melihat situasi di luar batas nasional atau *inward-looking* atau bersikap ofensif dengan hirau terhadap situasi di luar batas nasional atau *outward-looking*, yang mempengaruhi pengembangan postur pertahanan yang mampu menjelaskan sebab-akibat yang berdampak pada operasionalisasi teori postur pertahanan dalam menggambarkan fleksibilitas postur pertahanan Indonesia dalam merespon atau merefleksi persaingan dan ancaman yang ada. Keterkaitan dua kerangka pemikiran tersebut mengarah pada bentuk konektifitas dan afiliasi dua kerangka pemikiran yang digunakan dalam menjelaskan dan menjawab secara

komprehensif pertanyaan penelitian. Afiliasi keduanya akan menjadi bentuk kerangka penelitian yang memberikan gambaran, secara makro dan mikro, bagaimana Indonesia memaknai keamanan sebagai bentuk refleksi dan kesadaran negara terhadap lingkungan strategisnya dan pengaruh cara pandang doktrin pertahanan terhadap pengembangan postur pertahanan Indonesia.

1.12 Prosedur dan Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah langkah analisa yang akan ditempuh untuk menganalisa perubahan politik yang menentukan lingkungan strategis, serta cara pandang doktrin pertahanan yang mempengaruhi pengembangan postur pertahanan Indonesia dalam menghadapi lingkungan strategisnya, terutama di kawasan Asia Tenggara periode 2001-2004.

Perubahan lingkungan strategis mempengaruhi sebuah struktur otoritas horizontal dalam sistem internasional dimana peranan negara sebagai aktor mengalami degradasi. Degradasi tersebut ditandai oleh lahirnya aktor-aktor non-negara yang terlibat sebagai ancaman, baik konvensional maupun non-konvensional. Signifikansi penelitian ini adalah untuk berfokus pada perubahan lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara dan analisa postur pertahanan Indonesia. Fokus penelitian ini menekankan pada spesifikasi waktu tahun 2001-2004. Rentang waktu tahun 2001 dilaksanakan mengingat awal kejadian 9/11 di Amerika, bersamaan dengan awal dimulainya pemerintahan Bush dan kebijakan negara *superpower* Amerika Serikat yang bersifat global, termasuk di Asia Tenggara, yang menandai lahirnya babak baru global terror, yang menyebabkan polemik dinamika politik internasional dan *concern* bagi banyak kalangan, mengingat ancaman yang ditimbulkan memiliki efek yang sangat besar terhadap kelangsungan politik, ekonomi, dan sosial, serta keamanan dunia, serta seiring dengan pengembangan atau modernisasi postur pertahanan negara-negara lain, baik di kawasan maupun global. Rentang waktu penelitian dibatasi sampai tahun 2004, sebagai akhir dari rezim pemerintahan Bush pada periode pertama kepemimpinannya.

Analisa lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara dan pengaruh doktrin pertahanan terhadap pengembangan postur pertahanan Indonesia periode 201-2004 akan menjadi sebuah bentuk penelitian yang dilakukan untuk melihat pola hubungan antarvariabel: dependen dan independen atau interaksi sebab-akibat antarvariabel: dependen dan independen, yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian analisa yang bersifat eksplanatif sebagai bentuk refleksi terhadap kenyataan realitas sosial.⁵² Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menganalisa, mengidentifikasi, dan menjelaskan faktor dan indikator yang terkait dengan pertanyaan penelitian, untuk menjelaskan logika empiris yang diuraikan secara deduktif-induktif.⁵³

Analisa postur pertahanan Indonesia menggunakan teknik pengumpulan data, baik data kualitatif dan kuantitatif, yang terkait dengan studi dokumen mengenai kebijakan-kebijakan pertahanan. Analisa lingkungan strategis mengenai modernisasi postur pertahanan dan kebijakan pertahanan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara menekankan pada studi dokumen, sedangkan analisa kasus dominan atau analisa ancaman terorisme dianalisa melalui studi kasus. Analisa kebijakan global Amerika yang mempengaruhi lingkungan strategis di kawasan di Asia Tenggara dilakukan dengan metode pengumpulan data yang mengacu pada studi akademis. Studi dokumen adalah teknik pencarian data yang mengandalkan dokumen resmi atau kebijakan terkait yang dikeluarkan pemerintah, sedangkan studi literatur adalah teknik pengumpulan yang bersifat pada bentuk data teoritis atau data-data yang terdapat pada karya-karya ilmiah. Data yang dianalisa akan diklasifikasi atau dikelompokkan berdasarkan karakteristik masing-masing fungsi data, sesuai dengan tujuan penelitian. Data-data yang didapat merupakan hasil pencarian yang berbentuk 15 dokumen, 20 buku, 5 artikel, dan 13 jurnal,. Data-data tersebut adapun didapat melalui berbagai tempat, seperti Unit Perpustakaan dan Dokumentasi Hubungan Internasional (UPDHI) FISIP UI Depok, Perpustakaan FISIP UI Salemba, *website*, dan Jurnal Jstor, serta sumber-sumber lainnya.

⁵² W. Lawrence Newman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston: Pearson Education, Inc (fifth edition), 2003.

⁵³ *Ibid*, h. 72

1.13 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini akan dibagi dalam lima bab. Bab pertama adalah latar belakang mengenai cara pandang doktrin pertahanan dan pengaruhnya pada stagnasi postur pertahanan Indonesia dan perubahan lingkungan strategis secara umum sekaligus dan pertanyaan penelitian yang diajukan, serta metodologi penelitian yang digunakan. Bab kedua, secara detail, menjelaskan perubahan lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara periode 2001-2004 sebagai konteks yang mempengaruhi stabilitas kawasan, terkait dengan kebijakan global Amerika dan ancaman-ancaman konvensional dan konvensional yang mempengaruhi stabilitas kawasan. Bab ketiga menggambarkan pengembangan postur pertahanan Indonesia yang tidak merefleksi perubahan lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara periode 2001-2004 sebagai variabel dependen yang pengembangannya dipengaruhi oleh cara pandang doktrin pertahanan. Bab keempat, secara spesifik, menjelaskan cara pandang doktrin pertahanan yang masih bersifat *inward-looking* atau belum menjadi *outward-looking*, sebagai variabel independen, yang mempengaruhi kondisi dan stagnasi postur pertahanan, sekaligus sebagai kerangka analisa yang menjelaskan sebab-akibat atau interaksi antara variabel independen dan dependen yang bertujuan untuk menguji hipotesa. Bab kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dari pertanyaan penelitian dan saran atas permasalahan penelitian.